

FAKTOR EKOLOGIS ADMINISTRASI NEGARA DALAM KONTEKS PEMERINTAHAN DAERAH

Samel W. Ririhena

Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Musamus

email: samel1015@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memahami dan menjelaskan faktor-faktor ekologi dalam administrasi negara khususnya dalam konteks pemerintah daerah. Faktor-faktor ekologi atau lingkungan seperti, sosial budaya, agama, politik, ekonomi, hukum, dan pertahanan keamanan memang sangat berperan dalam sistem Administrasi Negara maupun pada sistem administrasi pemerintahan di daerah, karena perkembangan sistem administrasi negara sebaik apapun tidak dapat dilepaspisahkan dari faktor ekologi dari sistem administrasi negara yang bersangkutan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pelaksanaan administrasi negara dalam konteks pemerintahan daerah sangat diperlukan kemampuan dari administrasi negara dalam menghadapi perubahan dari faktor-faktor ekologi atau lingkungan, sehingga menimbulkan kestabilan dalam pelaksanaan administrasi negara itu sendiri dan akan berdampak kepada pelayanan yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya.

Kata Kunci: administrasi negara, ekologi, pemerintahan daerah.

PENDAHULUAN

Faktor ekologi tidak dapat dipisahkan dari perkembangan Administrasi Negara di seluruh Negara yang sedang berkembang dan salah satunya adalah Indonesia. Ekologi administrasi Negara atau yang dapat dikatakan sebagai factor lingkungan dalam pelaksanaan administrasi Negara khususnya yang berhubungan dengan pelayanan publik. Hal ini dapat dikatakan demikian karena tujuan dari Administrasi Negara adalah pelayanan publik yang sebaik-baiknya. Adapun faktor-faktor ekologis yang senantiasa pelaksanaan administrasi Negara Antara lain Politik, ekonomi, budaya, teknologi, *security* dan *natural resource*. Administrasi publik dalam melayani publik bertujuan untuk mensejahterakan dan memenuhi kebutuhan publik dengan cara menyediakan barang dan jasa namun tidak berorientasi pada profit. Adapun fungsi negara terdapat dalam UUD 1945 alinea ke 4 yakni: sebagai *Security* (keamanan); *Wealth* (Kesejahteraan); *Education* (Pendidikan); *Peace* (Perdamaian) dan *Relation*.

Sejak tahun 1999 dimana mulai munculnya gerakan reformasi yang menekankan pada persoalan pelayanan. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-

Undang No 32 Tahun 2004 dan selanjutnya diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dengan demikian pelaksanaan administrasi Negara ditingkat daerah seyogyanya selalu didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku dan disesuaikan dengan lingkungan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Hal ini perlu mendapat perhatian karena pelaksanaan Administrasi Pemerintahan daerah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Administrasi Publik, di mana faktor ekologis atau lingkungan selalu memengaruhi pelaksanaan pemerintahan di daerah khususnya yang berhubungan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Ekologi merupakan suatu pengetahuan yang mengkaji tentang hubungan timbal balik antara organisme hidup dengan lingkungannya atau dapat dikatakan juga ekologi adalah ilmu mengenai jaringan hubungan antara zat-zat organisme dengan unsur - unsur yang hidup dan mati dalam lingkungan (Salim, 1983). Dengan demikian pelaksanaan Administrasi Negara dalam konteks Administrasi Pemerintahan di Daerah yang merupakan satu organisme hidup akan dipengaruhi oleh faktor-faktor dari lingkungan pemerintah daerah. Selain itu Administrasi Pemerintahan Daerah juga dapat memengaruhi lingkungannya melalui kegiatan pembinaan, pengelolaan dan memproses kelangsungan pemerintahan di daerah agar sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya Riduan (2007) menyatakan bahwa pendekatan ekologis dalam administrasi Negara akan membahas hubungan-hubungan organisasi antara lingkungan eksternal dan internal dan kekuatan-kekuatan yang menentukan perubahan, interdependensi, yang lebih lanjut bermanfaat untuk menyusun model dalam perbandingan Administrasi Publik. Dalam arti luas, pendekatan ekologi memusatkan perhatian pada kehidupan kolektif dalam suatu himpunan; dan tidak dalam tindakan akan nilai individual. Pendekatan ekologi banyak bermanfaat dalam studi perbandingan sistem-sistem administrasi, seperti Fred Riggs dan Farrell Heady menyimpulkan bahwa lembaga-lembaga administrasi akan lebih mudah dipahami jika dilakukan dengan mengadakan identifikasi mengenai kekuatan yang melingkarinya, lembaga-lembaga dan kondisi yang membentuk dan memengaruhinya.

Dalam pelaksanaan Administrasi Negara khususnya dalam hubungannya dengan Administrasi Pemerintahan di Daerah, sangat dipengaruhi oleh faktor ekologis atau faktor lingkungan. Faktor lingkungan dalam pelaksanaan administrasi negara di tingkat pemerintahan daerah dapat memperlancar atau menghambat proses atau kegiatan Administrasi Negara dalam

hubungannya dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Faktor lingkungan yang berpengaruh dalam pelaksanaan Administrasi Negara di Lingkungan Pemertintahan Daerah adalah sebagai berikut: faktor sosial budaya, agama, ekonomi, politik, hukum dan pertahanan-keamanan

PEMBAHASAN

Perkembangan Kabupaten/Kota selalu dipengaruhi oleh faktor ekologis atau faktor lingkungan, yang senantiasa memengaruhi jalannya administrasi Negara di tingkat kabupaten/kota. Lingkungan sebagai faktor eksternal dalam pemerintahan kabupaten/kota sangat memengaruhi jalannya administrasi negara di tingkat kabupaten/kota. Faktor ekologi atau faktor lingkungan yang dimaksud di sini adalah faktor social budaya, ekonomi, politik, hukum dan pertahanan-keamanan. Untuk membahas faktor-faktor lingkungan yang memengaruhi administrasi negara seperti yang telah di kemukakan di atas, maka berikut akan dijelaskan pengaruh dari faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor Sosial Budaya

Berbicara menyangkut sosial budaya, berarti tidak dapat dilepaspisahkan dengan masyarakat yang hidup sebagai sebuah kelompok. Masyarakat yang merupakan sebuah kelompok social sebagai sebuah entity memiliki kehidupan bersama, di mana di dalamnya akan terbentuk berbagai kelompok sosial. Dalam kehidupan sebuah masyarakat yang di dalamnya ada organisasi sosial, struktur kelas dan sebagainya. Sudah tentu kelas sosial dan struktur kelas yang hidup di tengah kelompok masyarakat memiliki ciri dan sifat yang berbeda. Struktur sosial yang ada di tengah-tengah kelompok masyarakat memiliki nilai sosial yang mengatur kehidupan kelompok masyarakat tersebut. Nilai-nilai sosial yang ada akan mempengaruhi proses sosial dari kehidupan mereka yang memiliki daya kreativitas dalam mencetuskan ide-ide baru bagi perkembangan kehidupan masyarakat. Proses sosial akan membawa perubahan-perubahan dalam masyarakat yang terjadi, apalagi pada era teknologi dan informasi yang kian berkembang pesat ini, perubahan semakin cepat dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya perubahan yang terjadi dalam masyarakat ini, sangat dibutuhkan peran administrasi negara dalam mengendalikan perubahan yang terjadi.

Perubahan yang merupakan proses sosial dalam masyarakat juga akan berdampak kepada pelaksanaan administrasi negara pada umumnya dan khususnya Administrasi Negara

pada level pemerintah daerah. Hal ini dibuktikan dengan adanya otonomi daerah yang telah dilaksanakan sejak tahun 1997, di mana kearifan lokal turut diperhitungkan dalam proses pelaksanaan administrasi pemerintahan di daerah baik propinsi maupun kabupaten. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor sosial budaya sebagai salah satu faktor ekologi administrasi negara sangat memengaruhi jalannya administrasi negara di level Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia. Hal ini ditandai dengan pelaksanaan administrasi Negara yang tidak dapat dilepaspisahkan dari faktor sosial budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai penerima pelayanan publik.

Selain itu, di Indonesia hidup berbagai suku dan adat-istiadat yang perlu mendapatkan penanganan yang serius dari pemerintah baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat pemerintah daerah. Di mana hampir sebagian besar wilayah yang faktor sosial budaya atau adat istiadat yang masih kuat pengaruhnya dalam kehidupan pemerintahan. Salah satu pengaruh yang masih kuat adalah pembukaan atau penutupan suatu kegiatan yang bersifat nasional maupun pada tingkat lokal. Sebagai contoh: pembukaan maupun penutupan suatu kegiatan, yang terlebih dahulu mendapat ijin dari tokoh-tokoh adat setempat, dan juga pembukaan atau penutupan kegiatan selalu diiringi dengan sambutan-sambutan dan pemukulan gong atau tifa, pengguntingan pita dan lain sebagainya yang menandakan bahwa kegiatan tersebut resmi dibuka maupun ditutup. Dan bila tidak dilaksanakan acara-acara tersebut, maka kegiatan tersebut belum dapat dikatakan resmi.

Dari apa yang dikemukakan ini, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan acara tersebut terkesan hanya melakukan penghamburan biaya, waktu, maupun energi yang tidak relevan dengan tujuan dari kegiatan yang dilaksanakan. Oleh sebab itu, pemerintah khususnya pemerintah daerah perlu menyadari hal ini dan bagaimana melakukan perubahan-perubahan sehingga dalam pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat dapat diminimalisir sehingga biaya, waktu maupun energi tidak terbuang percuma dan bisa dioptimalkan dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat dapat terlayani dengan baik.

2. Agama

Faktor agama merupakan salah satu faktor ekologi atau lingkungan administrasi negara yang cukup berpengaruh dalam pelaksanaan Administrasi Negara di Indonesia secara

keseluruhan. Seseorang yang memiliki nilai-nilai agama akan dapat membentuk moral dan akhlak yang baik. Dengan demikian akan berdampak pada pelaksanaan Administrasi Negara khususnya dalam memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Dengan moral dan akhlak yang baik pasti dalam melakukan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat akan dapat berjalan dengan baik. Oleh sebab itu dalam rekrutmen pegawai atau pejabat selalu harus memenuhi salah satu persyaratan yakni "bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa". Persyaratan tersebut mengharuskan setiap pegawai atau pejabat pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dituntut memiliki ketaqwaan yang tinggi kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik karena yang dilayani adalah masyarakat (manusia).

Di sisi lain dalam pelaksanaan administrasi negara terlihat faktor agama sangat berpengaruh. Hal ini ditandai dengan pemberian libur untuk melaksanakan hari-hari besar keagamaan maupun ada pemberian toleransi kepada masyarakat yang beragama Islam untuk melaksanakan puasa. Dengan pemberian libur maupun pemberian toleransi dalam hubungannya dengan keagamaan memang sangat memengaruhi jalannya Administrasi Negara baik di tingkat pusat maupun daerah, di mana hari yang seharusnya disiapkan untuk melakukan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat akan tertunda karena harus libur. Bahkan di daerah tertentu dalam memperingati hari-hari yang berhubungan dengan keagamaan juga diberikan libur yang sifatnya fakutatif.

3. Politik

Keterkaitan faktor politik dalam ekologi Administrasi Negara sangat erat dan faktor politik tidak dapat dilepaspisahkan dari Administrasi Negara. Dapat dikatakan demikian karena politik merupakan pangkal tolak dari Administrasin Negara dan Administrasi Negara merupakan kelanjutan dari proses politik baik di tingkat pusat maupun di daerah. Woodrow Wilson (1974), administrasi adalah kelanjutan dari sebuah kebijakan artinya administrasi berjalan ketika sebuah kebijakan yang dihasilkan dari proses politik itu terjaga kestabilannya. Dapat dikatakan bahwa berbicara menyangkut politik berarti berbicara tentang kekuasaan karena orientasi dari politik adalah kekuasaan. Oleh sebab itu dalam hal mempelajari politik pada sebuah Negara berarti mempelajari kekuatan dan kekuasaan yang ada di dalamnya.

Berbicara tentang sistem politik, maka kita akan berbicara menyangkut dengan pembagian kekuasaan dalam sebuah Negara. Di mana sistem politik merupakan hubungan antar kekuasaan dan pemerintah maupun hubungannya dengan masyarakat. Sistem politik meliputi hubungan antara lembaga-lembaga kekuasaan seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam kehidupan Administrasi Negara diatur bagaimana pola hubungan antara lembaga-lembaga kekuasaan ini. Bagaimana pola hubungan pemerintah dengan legislatif yang merupakan representative dari rakyat, bagaimana rakyat diorganisir untuk dapat mengefektifkan kekuasaan. Sesuai dengan tujuan dari Administrasi Negara adalah bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang ditunjang dengan situasi atau kestabilan politik dalam suatu Negara. Administrasi Negara yang dijalankan oleh para birokrat, sangatlah dipengaruhi ketika terjadinya konflik kepentingan politis yang meliputi pemerintahan yang akan berimplikasi dengan mandegnya agenda formulasi kebijakan yang telah direncanakan. Formulasi kebijakan merupakan rumusan dari berbagai janji politik pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur dan wakil gubernur, maupun calon bupati dan wakil bupati ketika melaksanakan kampanye dalam pemilihan presiden dan wakil presiden maupun kepala dan wakil kepala daerah di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota. Ketika pemerintah tidak mampu berbagai kepentingan yang saling tarik menarik dalam hubungannya dengan kebijakan yang telah diformulasikan dan mengidentifikasi berbagai perbedaan tersebut menjadi suatu hal yang sinergis, maka akan berdampak pada masalah implementasi kebijakan yang telah disusun.

Dalam era otonomi daerah yang telah dilaksanakan dari tahun 1998, memang diakui memiliki banyak persoalan yang kompleks terutama yang berhubungan dengan pengaruh politik terhadap administrasi kebijakan di daerah, di mana pasti berbeda variabel-variabel pengaruh faktor politik dalam administrasi kebijakannya. Jorge Lowell (2001) dalam bukunya *Reformation Bureaucracy in Globalitation Era* mengatakan bahwa kesalahan terbesar bagi sakitnya birokrasi adalah disfungsi sistemnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa sistemlah yang akan meregulasi para aparatur birokrasi menjadi lebih efektif.

Sakitnya birokrasi kita diakibatkan oleh pengaruh persoalan-persoalan praktis, di mana setelah pemilihan kepala daerah baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota rekrutmen pejabat kadang tidak didasarkan pada keahlian dan kompetensi dari pejabat yang bersangkutan tetapi lebih banyak di tentukan oleh keterlibatan atau dukungan dari partai politik sebagai

pengusung calon yang bersangkutan. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam rekrutmen pejabat-pejabat publik masih terdapat faktor transaksional. Dengan kenyataan yang demikian, maka secara tidak langsung akan memengaruhi pemberian pelayanan kepada masyarakat sebagai penerima layanan dari pemerintah.

4. Ekonomi

Sesuai pasal 33 UUD 1945 yang dijadikan sebagai dasar perekonomian Indonesia sangat penting untuk dimaknai dalam pembangunan ekonomi secara nasional. Dengan demikian pemerintah perlu melakukan upaya-upaya dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat menuju kemakmuran di bidang ekonomi. Upaya-upaya yang dilakukan sangat dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan swasta dan juga sangat dibutuhkan koperasi dari masyarakat sebagai modal utama dalam pembangunan ekonomi. Bannock, Graham, Baxter dan Davis (2004) mengatakan bahwa pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu Negara.

Pembangunan sebagai suatu proses, artinya bahwa pembangunan merupakan suatu tahap yang harus dijalani oleh setiap masyarakat atau bangsa. Sebagai contoh, manusia mulai lahir, tidak langsung menjadi dewasa, tetapi untuk menjadi dewasa harus melalui tahapan-tahapan pertumbuhan. Demikian pula, setiap bangsa harus menjalani tahap-tahap perkembangan untuk menuju kondisi yang adil, makmur, dan sejahtera.

Sebagai suatu usaha, pembangunan merupakan tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita. Dengan demikian, sangat dibutuhkan peran serta masyarakat, pemerintah, dan semua elemen yang terdapat dalam suatu negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Hal ini dilakukan karena kenaikan pendapatan perkapita mencerminkan perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat.

Administrasi Negara berfungsi melakukan penataan dan pengaturan sistem ekonomi dalam suatu otoritas/pemerintahan agar terwujud efisiensi dalam tata kelola perekonomian. Sedangkan keadaan ekonomi suatu negara menunjukkan indikator keberhasilan penerapan administrasi negara oleh pemerintah negara tersebut.

Administrasi Negara juga bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum sangat berkaitan dengan ekonomi. Bagaimana manusia berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhannya dengan sumber daya/alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Pada hakekatnya administrasi negara berarti keterlibatan negara dalam masyarakat. Orientasi administrasi negara adalah non-profit. Di sini terlihat bahwa pelaku administrasi negara berusaha menciptakan pengaturan agar suatu lembaga non-profit *oriented* mampu menciptakan kemakmuran pada masyarakat tanpa menghasilkan kerugian bagi lembaga itu sendiri, contohnya Puskesmas dan Kantor Pos. Kesinergian ilmu ekonomi dan ilmu administrasi Negara sangat berperan di sini.

5. Hukum

Dalam pelaksanaan pelayanan publik sangat diperlukan upaya penegakan hukum atau *Law Enforcement* sehingga masyarakat yang mendapatkan layanan dari pemerintah akan mendapatkan sebuah kepastian hukum dalam hubungannya dengan layanan yang diterima. Hukum akan mudah ditegakkan, jika aturan atau undang-undangnya sebagai sumber hukum mendukung terciptanya penegakan hukum. Artinya, peraturan perundang – undangan sesuai dengan kebutuhan untuk terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik.

Soekanto (2008:5) mengemukakan bahwa penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut mempunyai makna yang netral, sehingga dampak positif atau negatif terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri yakni undang-undang;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Dengan demikian dalam hubungannya dengan pelaksanaan administrasi negara penegakan hukum sangat diperlukan sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat

mempunyai landasan hukum yang kuat sehingga aparat dalam memberikan pelayanan maupun masyarakat sebagai penerima layanan memiliki kepastian hukum. Khususnya pelaksanaan administrasi Negara di tingkat pemerintah daerah perlu ada penegakan hukum yang memadai karena proses pemberian layanan lebih banyak pada tingkat daerah terkhusus dalam hubungannya dengan otonomi daerah yang sementara dilaksanakan.

6. Pertahanan Keamanan

Faktor pertahanan dan keamanan juga merupakan salah satu faktor ekologi yang turut mempengaruhi jalannya Administrasi Negara baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah kabupaten/kota. Sejak kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 militer memegang peranan yang sangat penting dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, pada jaman rezim orde baru muncul apa yang di sebut dengan DWI FUNGSI ABRI dengan sistem kekaryaan. Dengan dwifungsi ini anggota ABRI terlibat dalam sistem Administrasi Negara, hal ini ditandai dengan keterlibatan anggota ABRI dalam berbagai departemen maupun lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsinya. Sampai dengan masa Reformasi pada tahun 1998 dwifungsi ini dihilangkan dan ABRI kembali kepada flatformnya.

Selanjutnya administrasi Negara dapat berjalan dengan baik apabila Negara dalam keadaan aman, dan di sini peran militer dalam menjaga kestabilan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu peran militer juga masih diperlukan dalam pelaksanaan sistem administrasi Negara. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Riduan (2007) mengemukakan bahwa adanya pengaruh timbal balik antara Administrasi publik terhadap Militer Hankam dapat tampak pada 2 hal sebagaimana di bawah ini. Pertama, karena anggota militer sewaktu-waktu harus siap bertugas di luar jajaran Departemen Hankam, maka diperlukan kualifikasi yang sesuai dengan tuntutan persyaratan jabatan yang dimaksud. Oleh karenanya, perlu adanya orientasi kepada kurikulum pendidikan militer agar dapat dihasilkan militer yang memiliki kemampuan untuk penugasan di luar hankam. Kedua, pelaksanaan sishankamrata, memerlukan pengarahan kekuatan rakyat, rakyat perlu dilatih dan diorganisir dalam kelompok yang sewaktu-waktu dapat digerakkan untuk menghadapi tugas hankamrata.

Simpulan

Ekologi dalam Administrasi Negara Indonesia sangat memiliki peran yang cukup strategis khususnya dalam hubungannya dengan Administrasi Pemerintahan Daerah yang berhubungan langsung dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Faktor-faktor ekologi dalam administrasi negara seperti sosial budaya, agama, politik, ekonomi, hukum dan pertahanan keamanan sangat berkaitan erat dengan pelaksanaan administrasi negara khususnya administrasi pemerintahan di daerah.

Terjadinya perubahan dari faktor-faktor ekologi atau lingkungan akan berdampak kepada pelaksanaan administrasi negara. Dengan demikian sistem administrasi negara dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian agar perubahan ekologi atau lingkungan dari administrasi negara yang terjadi akan berdampak bagi pelayanan yang akan diberikan oleh negara kepada masyarakat.

REFERENSI

- Bannock Graham, R. E. Baxter dan Evan Davis. 2004. *A Dictionary of Economics*. Inggris: Penguin Books Ltd
- Emil Salim. 1983. *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Penerbit Mutiara, Jakarta.
- Jorge Lowell. 2001. dalam bukunya *Reformation bureaucracy in Globalitation Era*
- M.Riduan K. 2007. *Sistem Ekologi Administrasi Negara Republik Indonesia*, Aliansi, Jurnal Manajemen dan Bisnis Volume 2 nomor 3 Mei 2007.
- Riduan. 2007. *Sistem Administrasi Publik di Indonesi*, Jurnal Manajemen & Bisnis Aliansi.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.